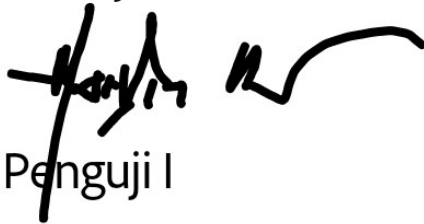


**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR BERJENIS ANGKUTAN BARANG
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

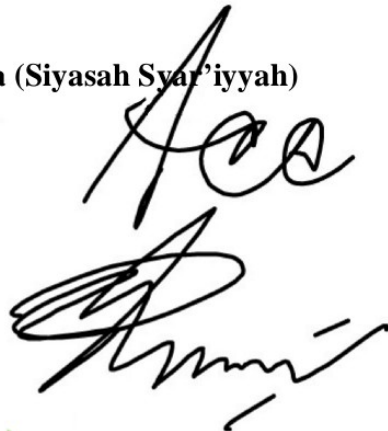
disetujui cetak


Penguji I

Oleh :
RIZKI MAULANA YUDI
NPM : 1621020304

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Penguji II
19/2/2021





**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2020 / 1441 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEW
ENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERJENIS ANGKUTAN
BARANG
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
RIZKI MAULANA YUDI
NPM : 1621020304**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror., M.H
Pembimbing II : Relit Nur Edi., S. Ag., M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2020 / 1441 H**

ABSTRAK

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah organisasi yang memberikan pelayanan terkait dengan lalu lintas dan transportasi darat, laut, dan udara. Salah satu program Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik dari kendaraan yang berukuran kecil, sedang, hingga berukuran besar. Kewenangan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor tertuang juga pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dibahas lengkap pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015. Serta Dilapangan Masih banyak pula kendaraan berjenis angkutan Barang yang tidak layak pakai tetapi masih beroperasi. Mengacu kepada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Kota Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Di Kota Bandar Lampung ?.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang . Serta mengetahui pula dari segi kacamata ilmu Fiqh Siyasah terkait dengan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung . Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulannya untuk mengetahui apakah Uji kir yang tertuang dalam undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :“uji berkala wajib di lakukan untuk mobil penumpang umum, mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan, dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan. Dalam hal pengujian kendaraan bermotor mempunyai beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang mereka miliki yakni: memeriksa kondisi mulai dari lampu-lampu, emisi gas buang , sistem kemudi, kaki-kaki, speedometer, sistem pengereman, kelayakan ban, kaca, klakson, dan keadaan mobil yang wajib tidak boleh dimodifikasi (standar). Serta tempat pengujian kendaraan bermotor tersebut sudah pasti memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti: Ruang tunggu, kantin, serta tempat ibadah (Mushalah) sudah sepenuhnya diterapkan atau tidak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Maulana Yudi

NPM : 1621020304

Jurusan/Prodi : Syasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung** ” adalah benar-benar merupakan hasil karya hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Desember 2020

Penulis,

Rizki Maulana Yudi

NPM. 1621020304



**KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS
AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : **Rizki Maulana Yudi**
NPM : **1621020304**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul Skripsi : **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam
Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor Berjenis Angkutan Barang
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung)"**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 19 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Relit Nur Edri, S.Ag., M.Kom
NIP. 196901051998031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Rizki Maulana Yudi NPM 1621020304** program studi **Hukum Tatanegara (Siyasa Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal: Jum’at 8 Januari 2021

TIM PENGUJI

Ketua :Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris :Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I :Marwin., S.H., M.H. (.....)

Penguji II :Dr.H.Khoirul Abror.,M.H (.....)

Penguji III :Relit Nur Edi.,S.Ag.,M.Kom.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(Q.S An-nisa ayat:58)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT atas karunia serta kemudahan yang di berikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Zayudi dan Ibunda Asnawati yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a,
2. Kakak-kakak Laki-laki Tersayangku Iman Wahyudi, Kakak Sepupuku Indra Angkasa., S.E dan Andri Timur., S.H, serta kakak-kakak sepupuh lainnya dan seluruh Keponakanku yang selalu memberikanku inspirasi, motivasi dan semangat.
3. Sahabat-sahabat baik yang berada di masa perkuliahan, Sahabat di Lingkungan Tempat Tinggal dan Sahabat yang Spesial mereka yang selalu memperikan suport.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Rizki Maulana Yudi, lahir pada tanggal 09 Juli 1998 di Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan Anak Kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Zayudi dan Ibu Asnawati. Beralamat di Desa Rangai Tri Tunggal Kelurahan Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Indonesia.

1. Saya mulai menempuh pendidikan di SDN 02 Rangai Pada Tahun 2004. Selama menjadi murid SDN 02 Rangai, Saya sering mengikuti kegiatan Pramuka dan Paskibra.
2. Saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama SMP Dharmapala Panjang Bandar Lampung pada Tahun 2010.
3. Pada Sekolah Menengah Atas, Saya Melanjutkan jenjang pendidikannya di SMKN 2 Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013. Selama Sekolah Menengah Atas saya aktif dalam ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR), Palang Merah Remaja (PMR), dan Rohani Islam (ROHIS).
4. Pada tahun 2016 saya melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 19 Desember 2020

Penulis

Rizki Maulana Yudi

NPM. 1621020304

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang saya beri judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, amin.

Saya dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai. Relit Nur Edi., S.Ag., M.Kom.I selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
7. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Indah Pratiwi , Ahmad Muchilisin, Via Susanti, Umayyatun Uswa, Eni Marlina, Revi Puja Sari, Ong Ardhe Saliem, Mega Setiawan, Woro Lestari, Aprilia, Fitri Diana, teman-teman kelas D angkatan 2016 jurusan siyasah syar'iyah, dan teman-teman KKN Kelompok 207 di Pekon Argopeni Kec. Sumberejo, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 19 Desember 2020

Rizki Maulana Yudi
NPM. 1621020304

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGHANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABLE	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikasi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.	
1. Pelayanan publik dan kewenangan	20
a. Pengertian Pelayanan Publik	20
b. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	22
c. Asas-asas Pelayanan Publik	23
d. Standar Pelayanan Publik.....	25
e. Kewenangan.....	26

f. Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang	29
g. Indikator Kinerja Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	37
2. Tinjauan Fiqh Siyasah	38
a. Pengertian Fiqh Siyasah	38
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	45
c. Tujuan Fiqh Siyasah	48
B. Tinjauan Pustaka	59

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Sejarah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	61
2. Visi Misi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	62
3. Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	63
B. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang	65
1. Dasar Hukum	65
2. Sarana dan Prasarana	65
3. Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang	68
4. Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang	72
5. Akibat Tidak Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor	77
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	78
1. Faktor Pendukung	78
2. Faktor Penghambat	79

BAB IV. ANALISA DATA

A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang	82
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	86

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Fungsi dan Tugas Pokok	62
2. Fasilitas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung	63
3. Peralatan Utama Uji Berkala Kendaraan Bermotor	64
4. Peralatan Penunjang Uji Kir Kota Bandar Lampung	65
5. Data Kendaraan Angkutan Barang Yang Diuji UPT Fasilitas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian Di Daerah Provinsi Lampung Dari
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian/Survei Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Bandar Lampung.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 5 : Dokumentasi Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung

Lampiran 6 : Blanko Bimbingan Skripsi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan.
- Lampiran 5 : Dokumentasi Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Lampiran 6 : Blanko Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna Memperjelas Pokok Bahasan Penulisan Skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** Adapun beberapa hal yang penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Tinjauan

Tinjauan adalah Sudut Pandang atau Pandangan.¹

Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah Terbagi menjadi 2 kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Fiqh Fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.² Siyasah mengandung arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan Pengendalian. Siyasah juga bisa diartikan sebagai pemerintah dan politik.³ Fiqh Siyasah adalah ilmu

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999). h.1062

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulala Ar Rasyidun* (Bandung : Pustaka Setia. 2015), h.14

³ Ibid., h.25.

yang mempelajari hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan negara menurut islam.

Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴

Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah.⁵

Pelayanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperkukan seseorang).⁶

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan yang menguji atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

⁴ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar : Pustaka Refleksi. 2010). h.35.

⁵ M.N. Nasution, 2008. *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, h.95.

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.415

husus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.⁷

Angkutan Barang

Pengangkutan berasal dari kata “angkut”. Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan ini mutlak serta efisien.⁸

Kota Bandar Lampung

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem perkotaan adalah sekelompok kota-kota yang tergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota, indeks, dan keutamaan kota serta fungsi kota. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi kedalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.015.910 jiwa⁹

Dari beberapa pembahasan istilah diatas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengujian_kendaraan_Bermotor. (diakses pada hari selasa 21- 01 – 2020 Pukul 11:55 WIB)

⁸ R. Soekardono, S.H., *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.h.5

⁹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota>(Di akses pada 1 maret 2020, pada pukul 08:00 WIB)

Perhubungan Bandar Lampung) adalah Bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan bandar Lampung Kota Bandar Lampung dalam hal pelayanan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang ditinjau dari Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul.

Penulis mempunyai alasan secara objektif dan subjektif sehingga penulis memilih judul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” yaitu :

1. Secara Objektif.

Dalam hal pengujian kendaraan bermotor mempunyai beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang mereka miliki yakni: memeriksa kondisi mulai dari lampu-lampu, emisi gas buang , sistem kemudi, kaki-kaki , speedometer, sistem pengereman, kelayakan ban, kaca, klakson, dan keadaan mobil yang wajib tidak boleh dimodifikasi (standar) yang dijelaskan secara lengkap pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam Prakteknya masih banyak dijumpai pengujian kendaraan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga tidak jarang kita melihat kendaraan bermotor angkutan barang memiliki kondisi fisik

yang tidak layak, tetapi kendaraan angkutan barang tersebut masih beroperasi.

2. Secara Subjektif.

- a. Judul yang diambil berkaitan dengan jurusan Hukum Tata Negara sehingga sangat sesuai dengan ilmu penulis teliti sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Setahu saya mengacu pada data fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, belum ada yang membahas permasalahan ini, sehingga memungkinkan penulis untuk mengangkat judul ini untuk dikembangkan sebagai judul skripsi dan menambah wawasan, pengetahuan, serta wacana ilmu, dalam rangka membuat pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang jauh lebih baik.

C. Latar Belakang Masalah

Dinas Perhubungan Bandar Lampung Kota Bandar Lampung adalah organisasi yang memberikan pelayanan terkait dengan lalu lintas dan transportasi darat, laut, dan udara. Salah satu program Dinas Perhubungan Bandar Lampung adalah pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik dari kendaraan yang berukuran kecil, sedang, hingga berukuran besar.

Untuk itu Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga negara untuk mengatur transportasi dilingkup nasional dengan nama lembaga tersebut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.¹⁰ Dilingkup nasional Kewenangan Dinas Perhubungan secara umum hanya dapat dilaksanakan di terminal atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 262 Ayat (2), menyebutkan bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap¹¹

Dinas Perhubungan selaku Dinas yang memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna kendaraan bermotor angkutan barang agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor angkutan barang diperlukan suatu kinerja pelayanan publik yang baik agar terciptanya tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor menurut saya.

Agar pelayanan publik dicapai secara maksimal Aparatur Sipil Negara yaitu pegawai dari dinas perhubungan bandar lampung tersebut

¹⁰Ainun Nafiza dan Ernawati, Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan kota (Uji Kir), *Jurnal Fisip Universitas Riau*.h.2.

¹¹ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutn Jalan Pasal 262 Ayat (2)

seharusnya mengacu pada undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan keseriusan dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.¹²

Dalam Pengujian Kendaraan mempunyai tahap mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu terdapat pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Pemeriksaan Menurut Pasal 11 Ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. Nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. Kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan tinggi;
 - e. Kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. Ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. Kondisi sistem suspensi;
 - h. Kondisi sistem rem utama;

¹² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- i. Kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. Kondisi panel instrumen pada dasbor kendaraan;
- k. Kondisi kaca spion;
- l. Kondisi spakbor;
- m. Kondisi bumper
- n. Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
- o. Rencana teknis dan kendaraan sesuai peruntukan;
- p. Kondisi dan keberadaan fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus, dan
- q. Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.¹³

Dalam menjalankan pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, menempatkan pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor sebagai bagian terpenting untuk Melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang demi kelancaran perekonomian masyarakat.

Namun pada kenyataannya pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah belum berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Banyaknya keluhan dan berbagai pengaduan dari

¹³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

masyarakat mencerminkan bahwa belum maksimalnya kinerja pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik.

Keadaan yang demikian bisa saja terjadi di Dinas Perhubungan, Bandar Lampung. Dari hasil observasi sementara menunjukkan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Bandar Lampung sudah mengupayakan memasang papan pemberitahuan mekanisme alur pengujian kendaraan bermotor dan syarat pengujian kendaraan bermotor seperti foto copy stnk, buku kir serta membawa kendaraan yang akan di uji. Hanya saja pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor nampaknya belum semuanya mengerti dan memahami secara prosedur. Serta fasilitas yang disediakan seperti ruang tunggu, tempat ibadah, kantin kurang baik.

Selain itu adanya permasalahan yang di hadapi oleh Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Bandar Lampung yaitu , kurangnya ketelitian yang perlu ditingkatkan kembali dalam hal pengujian kendaraan bermotor karna masih ada kendaraan seperti Mobil angkutan barang baik berukuran kecil dan besar yang memiliki suku cadang serta memiliki bentuk fisik pada kendaraan tersebut yang terlihat tidak layak pakai dan masih digunakan di Kendaraan tersebut serta masih beroperasi. Serta upaya penegakan disiplin perihal kendaraan angkutan barang yang mempunyai komponen komponen yang harus diganti tetapi masih beroperasi harus lebih dipertegas kembali.

Merujuk pada dasar – dasar keislaman hadits dan ayat Al-Qur'an tentang orang yang bekerja secara profesional adalah mereka yang menyubangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan Diri, Keluarga, Masyarakat, dan Negara tanpa menyusahkan orang lain serta bekerja memengerjakan amanah yang diberikan dan berlaku adil. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja dengan amanah dan adil, salah satunya allah berfirman dalam Al-Qur'an yang memerintahkan tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yakni terdapat didalam Qs. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah dilaksanakan, diperhatikan, serta di implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Secara normatif (ajaran) di atas, seharusnya kaum muslim khususnya di indonesia memiliki kinerja yang tinggi. Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja dengan niat utamanya untuk ibadah kepada Allah. Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram seperti korupsi dan merampok. Kemudian tidak meragukan orang lain saling

meridhai, tidak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau *rahmatan lil alamin*. Kalau demikian maka seharusnya produktifitas kerjanya tinggi. Namun dalam prakteknya belum semua umat menerapkan ajakan dari peringatan allah tentang pekerjaan. Oleh sebab tersebut penulis memilih memecahkan masalahnya melalui karya ilmiah yang berjudul: “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**”

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini di difokuskan pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Ingin mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Berupa ide dan inspiratif agar mampu mengembangkan ilmu dan metode yang lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran dan sebagai bahan sumbangan peneliti kepada akademisi maupun masyarakat dan khususnya kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam menangani masalah Pengujian Kendaraan Berjenis Angkutan Barang di Kota Bandar Lampung.

3. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, Metode Penelitian ini sering kali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹⁴ Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field reasearch*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dalam lingkungan.¹⁵ Disini penulis akan terjun kelapangan dimana penulis hendaknya meneliti bagaimana kewenangan dinas

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.26.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Alimni, 1986), h.33.

perhubungan kota bandar lampung dalam pengujian kendaraan berjenis angkutan barang.

b. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dsekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu¹⁶

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber serta diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilapangan yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan pelayanan umum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibuat makna yang dalam suatu topik tertentu.¹⁷

¹⁶ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

¹⁷ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.107.

Berdasarkan pengertian diatas, dijelaskan bahwa metode wawancara merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan. Didalam penelitian ini tentunya akan menseleksi yang akan diwawancarai, memang persoalan yang sulit, karena bagi penelitian atau pewawancara yang baru pertama kali berada dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu, seblum mengenai individu atau informasi mana yang akan diwawancarai. Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut penelitian atau pewawancara melalui dengan seseorang informasi pangkal (*Key Informan*).

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁸

c. Observasi.

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap

¹⁸ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut¹⁹

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi non partisipasi, dimana penelitian berlaku sebagai pengamat dan tidak diambil dalam aktivitas yang dilakukan.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana Peraturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di Implementasikan dengan benar atau tidak oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.²¹

Populasi yang digunakan yakni yang terkait dalam pengujian kendaraan bermotor yakni: Kepala UPT

¹⁹ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneliian Hukum cetakan ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.107.

²⁰ Sutrisno dan Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), H. 151.

²¹ Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung Manjar Maju, 2002), h. 34.

PKB, Kepala Teknis Pengujian PKB, dan 2 orang pegawai yang bertugas dalam pengujian kendaraan.

b. Sampel

Sample adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi²². Sample yang akan penulis gunakan adalah *nonprobalitas sampling* dengan teknik yang digunakan yaitu *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan siapa yang ditemui dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung diwawancara²³. Sample yang akan digunakan dipenelitian ini antara lain: Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor(1 orang), Kepala Bagian Teknis Pengujian (1 orang), Aparatur (2 orang) dan (Konsumen 2 orang). Maka Sample Berjumlah 6 Orang yang dilakukan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasipasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan

²² Ibid.

²³ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6*, (Jakarta:Rajawali pers 2012), h.107.

masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggoilongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁴ Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), pengoreksian apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan Benar
- b. Penandaan Data (*Koding*), Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data
Yaitu penyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data (*sistemizing*), Yaitu Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.²⁵

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil- hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan

²⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana 2011), h.141.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.²⁶

²⁶ *Ibid.* h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pelayanan Publik dan Kewenangan

a. Pengertian Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.¹

¹ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada.2017) h.21.

Pelayanan oleh pemerintah (*Government Service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employees*”² dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat atau warga negara yang dilakukan oleh pemerintahan melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan yang biasa disebut sektor publik (*public sector*), yakni badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik milik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya.³ Penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. pemerintah sebagai penyedia harus bersikap profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik.

Disamping itu, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh bagus tidaknya penyelenggaraan publik⁴. Sehingga sangat jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik yakni memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa maupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan

² Savas, E.S. 1987. “*Privatization: The Key to Better Government*”. New Jersey: Chatam House Publisher. h.62

³ Putra, Fadhillah. 2012. *New Public Governance*. Malang: UB Press. h.62.

⁴ Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama. Hal. 17.

pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat dan berkaitan dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang penting.

b. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik:

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian dan Tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.
4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Bertanggung jawab: pejabat yang dipilih bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan pengatasan keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Perlengkapan sarana dan prasarana: siapnya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang mencukupi, mudah dijangkau oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat teknologi dan informasi.
9. Kejujuran: Cukup Jelas.
10. Kecermatan: berhati-hati, telaten dan teliti.
11. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan: Pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga pelayanan merasa dihargai haknya.
12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum.⁵

c. Asas-asas pelayanan publik

Terdapat beberapa asas dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yakni:

1. Empati dengan *costumers*. Pegawai yang bertugas melayani urusan perizinan harus bisa berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

⁵ *Ibid.* Sujardi. 2012. h.65

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus direncanakan sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar diterapkan.
3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan mesti didesain sesederhana mungkin dan diinformasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Meminimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sedikit mungkin dan sebanyak yang benar diperlukan saja.
5. Kejelasan terkait kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pemakai jasa pelayanan harus dituliskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan diberikan keterangan kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminim mungkin dan harus transparan.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan harus pula pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Meminimalisir formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komplit (satu untuk semua)
9. Memaksimalkan masa berlaku izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin karena terlalu pendek masa berlakunya.

10. Kejelasan dan kewajiban providers maupun bagi costumers. Hak-hak dan kewajiban baik bagi providers maupun bagi costumers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.⁶

d. Standar Pelayanan Publik

Setiap pelaksana atau penyedia pelayanan publik haruslah memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya standarisasi pelayanan publik perlu diumumkan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai pemakai pelayanan publik. Standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib dipatuhi oleh penerima pelayanan.

Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur pelayanan.

Prosedur pelayanan yang digunakan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian.

⁶ Ratminto dan Atik Winarsih.2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.h. 246.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan.

Biaya atau tarif pelayanan termasuk biaya perinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan.

Hasil yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan kompetensi harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

e. Kewenangan

Di dalam referensi ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipergunakan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

memiliki bentuk hubungan yang mempunyai arti bahwa “ ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)”.⁷

Melihat pengertian diatas, bisa menjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan huku,. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh max weber disebut sebagai wewenang nasional atau legal, yakni wewenang yang berlandaskan suatu sistem hukum ini dapat dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara.⁸

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dipakai dalam bentuk kata benda serta sering disejajarkan dengan istilah “*bevogheid*” menurut istilah hukum belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, bila dicermati ada sedikit perbedaan dari istilah kewenangan dengan istilah “*bevogheid*”. Perbedaan terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevogheid*” dipakai dalam konsep hukum politik maupun didalam hukum privat. Didalam konsep hukum kata istilah kewenangan atau wewenang seharusnya dipakai dalam konsep hukum publik.⁹

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau istitusi menurut ketentuan yang berlaku, maka demikian kewenangan

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 30

⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Pen elitian Segi – Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung Jawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga: 1990). h. 30

⁹ Philipus M. Hadjon, *Penghantar Hukum Administrasi Indonesia.*, (Surabaya : Yuridika, 2002), h. 27.

juga menyangkut kemampuan tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut faedah-faedah absah yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁰

Menurut H.D Stout, Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang yang berasal dari pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik.¹¹

Sedangkan Menurut Bagir Manan dalam bukunya Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 berpendapat bahwa, kewenangan didalam bahasa hukum itu tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan dan tidak melakukan. Sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹²

Wewenang merupakan suatu bagian yang sangat penting serta bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindakan pemerintah didasari dari wewenang yang diatur didalam perundang –undangan.¹³

Philipus M. Hadjon, Mengutarakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu :

¹⁰ Tubagus Ronny Ramhan Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. (Jakarta :Peradaban. 2002), h. 102.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71 .

¹² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). h. 37

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005). h. 153.

- 1) Atribusi , yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang – undang.
- 2) Delegasi, adalah pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan disandingkan pemindahan tanggung jawab.
- 3) Mandat, yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan – pengalihan tanggung jawab. Yang ada hanya janji kerja interen antara pengusaha dan pegawai.¹⁴

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

f. Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang

1). Jenis-jenis kendaraan

a). Kendaraan Ringan (KR).

(1). Kendaraan Penumpang (mobil)

Mobil (kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani '*autos*' (sendiri) dan Latin '*movére*' (bergerak)) adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang membawa mesin sendiri. Pada awalnya mobil merupakan kendaraan bertenaga

¹⁴ Philipus M. Hadjon, op.cit. h. 27.

uap. Pertama kali dibuat pada akhir abad 18. Nicolas- Joseph Cugnot dengan sukses mendemonstrasikan kendaraan tersebut pada tahun 1769.

b). Kendaraan Berat (KB).

Contoh kendaraan berat yaitu truk dan bus.

(1). Truk

Truk adalah sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang, disebut juga sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang kecil mobil barang disebut sebagai pick-up, sedangkan bentuk lebih besar disebut sebagai truk tronton, sedang yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan disebut sebagai truk trailer. Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, diantaranya jumlah ban, jumlah sumbu/konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan.

(2). Bus.

Bus adalah kendaraan besar beroda, digunakan untuk membawa penumpang berjumlah besar/banyak. Istilah bus berasal dari bahasa latin *Omnibus*, yang berarti “(kendaraan yang berhenti) disemua (perhentian)”. Bus pula memiliki beberapa ukuran, dari yang ukuran kecil dan besar, serta bus yang mempunyai 1 lantai (single kabin) dan mempunyai 2 lantai (double kabin/tingkat).

c). Kendaraan Tidak Bermotor

Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakan oleh peralatan teknik yang biasanya peralatan tersebut

terdapat pada kendaraan bermotor. Umumnya kendaraan tidak bermotor digerakkan oleh tenaga hewan ataupun manusia. Contoh kendaraan tidak bermotor yaitu becak dan sepeda¹⁵.

2). Angkutan Barang.

Pendapat Zaeni Ashadi, angkutan barang adalah muatan yang diangkut oleh kendaraan khusus barang yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis yang diklasifikasikan sebagai barang umum(*general goods*), barang yang mudah rusak (*perishable goods*), barang beracun termasuk pula *animal product*, jenazah, hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.¹⁶ Menurut pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas, a. angkutan barang umum, dan b. Angkutan barang khusus. Angkutan barang umum adalah angkutan pada umumnya yg ada, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan perlakuan khusus, sedangkan angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat-alat berat, serta membawa barang berbahaya dan mudah meledak antara lain; gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, cairan mudah menyala, gas padat mudah menyala, bahan penghasil oksidan, racun,

¹⁵ *Jenis-jenis kendaraan* <https://kasriani.wordpress.com/2011/02/14/jenis-jenis-kendaraan/> di akses pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 15:20

¹⁶ Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006). h. 38

dan bahan yang mudah menular; barang yang bersifat radio aktif, dan barang yang bersifat korosif ¹⁷.

3) Dasar Hukum Angkutan Barang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak sekali aturan yang tersebar dalam pasal demi pasal mengenai ketentuan pelanggaran dan tata cara pemuatan dimensi kendaraan barang seperti yang telah diatur dalam undang-undang ini, yaitu yang mencakup: Pasal 48, mengatur soal persyaratan teknis dan laik jalan; Pasal 49, 50, 51, 52, 53, dan Pasal 54, mengatur masalah pengujian bermotor, Pasal 71 soal kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib melapor kepada POLRI dan pasal 106 Ayat (3) dan Ayat (5) mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor; Pasal 169 terkait dengan pengawasan muatan barang ; Pasal 262 mengatur tentang kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); Pasal 227 mengatur ketentuan pidana tentang kewajiban uji tipe; Pasal 285 ayat (2), mengatur pidana tentang persyaratan teknis kendaraan bermotor; Pasal 286 ketentuan pidana tentang persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan Pasal 287 Ayat (6) ketentuan pidana tentang pengganengan dan penempelan kendaraan bermotor. Pasal 288 Ayat (3), mengenai ketentuan pidana tentang surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala; Pasal 301, mengenai ketentuan pidana tentang jaringan jalan sesuai kelas

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 160 tentang Lalu lintas dan Angkutran Jalan.

jalan; Pasal 305, mengatur ketentuan pidana tentang kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus; Pasal 306, soal ketentuan pidana tentang surat muatan; Pasal 307, mengenai ketentuan pidana tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan angkutan barang umum; dan Pasal 308, mengenai ketentuan pidana tentang perizinan angkutan. Disamping itu, ketentuan lainnya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor.44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, yakni Pasal 115, mengenai ukuran dan muatan kendaraan bermotor¹⁸.

4) Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam Pengujian Kendaraan mempunyai tahap mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu :

a). Pendaftaran.

Pemilik kendaraan/pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan :

(1) Mengisi formulir Permohonan

(2) Melunasi biaya uji

¹⁸Dasar hukum Pelaksanaan Angkutan Barang <https://sumbarprov.go.id/details/news/12869>. Dikutip tanggal 13 juli 2020, pukul 14:38 WIB.

(3) Kendaraan dibawa ke unit pengujian kendaraan bermotor

b). Penetapan dan Pembayaran Retribusi.

Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang berlaku dan sebagai berikut :

- (1) Penentuan besaran retribusi berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Membeli buku uji (kendaraan baru/buku uji habis) dan tanda lulus uji/ plat uji.
- (3) Penghitungan jumlah dan penetapan retribusi.
- (4) Membayar biaya retribusi dan mendapatkan tanda bukti pembayaran.

c). Pemeriksaan kendaraan meliputi :

- (1) Pra Uji
- (2) Uji Mekanik

d). Verifikasi

Verifikasi data dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.

e). Pengesahan.

Petugas Administrasi dibagian plat uji melakukan entry nomor seri buku uji (Untuk ganti buku uji) kemudian melakukan pengesahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk oleh petugas yang

berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, selanjutnya buku uji diserahkan kepada pemohon dan petugas bagian dokumentasi, kartu induk menjadi satu dan disimpan pada arsip.

f). Pelaksanaan Pra Uji Kendaraan Bermotor (pemeriksaan Visual)

(1). Pra Uji, Yaitu pemeriksaan awal kendaraan Uji yang meliputi :

- (a). Melakukan pencocokan data kendaraan
- (b). Konstruksi kendaraan bermotor berupa pengamatan secara visual
- (c). Rangka landasan merupakan pemeriksaan kondisi.
- (d). Motor penggerak merupakan pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- (e). Sistem pembuangan merupakan pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- (f). Penerus daya
- (g). Sistem roda
- (h). Sistem suspensi
- (i). Alat kemudi
- (j). Sistem rem
- (k). Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya
- (l) Komponen pendukung berupa pemeriksaan unjuk kerja :

1. Speedometer

2. Kaca spion

3. Penghapus kaca (wiper)

4. Klakson

5. Sabuk pengaman

6. Spakbor

7. Bumper

(m). Badan kendaraan, terdiri dari pemeriksaan , pengukuran, dan pengamatan secara visual.

(n). Peralatan dan perlengkapan kendaraan, terdiri dari pemeriksaan dan pengamatan secara visual.

(o). Perisai Kolong,

- Apabila kereta gandeng atau kereta tempelan yang tinggi ujung landasannya bagian belakang atau samping kiri badannya berjarak 700 milimeter diatas jalan

- Apabila sumbu paling belakang berjalan lebih dari 1.000 milimeter yang diukur dari sisi keluar bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan.

(p). ukuran kendaraan berupa pengukuran dimensi kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan.

(q). Berat kendaraan merupakan penimbangan untuk menentukan berat yang diizinkan (dilakukan pada uji kendaraan bermotor yang pertama kali).

(2). Pelaksanaan uji mekanik kendaraan bermotor, uji mekanik meliputi :

(a). Uji Emisi Gas Buang

(b). Uji Sepeedometer

(c). Uji Lampu Utama

(d). Uji Klakson dan Kebisingan

(e). Uji Kunci Roda depan, Berat Kendaraan, dan Rem¹⁹

g. Indikator Kinerja Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- 1) Terwujudnya Sarana Transportasi Darat Yang Berkeselamatan. Merupakan pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor guna mendeteksi kendaraan tersebut layak jalan.
- 2) Tersusunnya Kebijakan Sarana Transportasi Darat. Merupakan susunan peraturan/persyaratan keelayakan kepegawaian yang

¹⁹ [http:// dishub.wonogirikab.go.idoy/halaman/detail/pengujian-kendaraan-bermotor](http://dishub.wonogirikab.go.idoy/halaman/detail/pengujian-kendaraan-bermotor).
(diakses pada 02/02/2020 pukul 20:00 WIB)

bertugas dipengujian kendaraan bermotor untuk tercapainya kinerja yang baik serta pelayanan yang optimal.²⁰

2. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquna-fiqhan*.²¹ *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara*. Secara bahasa *fiqh* adalah paham yang mendalam, Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al Qur’an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”²²

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena bagi-nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.²³

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mutajtahidin*) untuk menggali

²⁰ Penetapan Kinerja Tahun 2018 SUB DIREKTORAT UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 2.

²² *Ibid*, h. 3.

²³ Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), h.9.

hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²⁴

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah). Aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).²⁵

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengstur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan inni megisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁶

Secara terminologi *siyasah* berarti hukum-hukum *syara* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (Negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak maunisia.²⁷ Kedua sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin Negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat,

²⁴ *Ibid*, h. 10.

²⁵ *Ibid*, h. 3.

²⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 49.

²⁷ *Ibid*, h. 50.

kendati tidak tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dan ketiga *ta'dzir* ancaman dan hukuman.²⁸

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkanya dari berbagai kemudharatan yang mungnkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaininya²⁹.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya³⁰. Sementara Louis Ma"luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, h. 51.

²⁹ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), h. 17.

³⁰ *Ibid*, h. 9.

- 1) Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- 2) *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kejian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan nsemer hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengantur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.
- 3) Adapula istilah *al-siyasah al-syar'iyah* termasuk kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukan makna satu perkara. Oleh itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, member definisi beragam mengenai *al-siyasah syar'iyah* diantaranya Ibnu Aqiel al-Hambali mengantakan, "*al-siyasah al-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan dari kerusakan, kendati keterangan tentang tidak disyari'atkan oleh Rasullah saw. Dan tidak pula diturunkan melalui wahyu."³¹

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan

³¹ *Ibid.*, h.50.

pokok dasar *syari'at* islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasat syari'ah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu³².

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang member petunjuk bagi para pemimpin dan *Ulil Amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

- 1) Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*)
- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah uuntuk mrnciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*)

³² Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)., h.4.

- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat *syariat* Islam yang universal³³.

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam
- 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawwah*)
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*adam al-haraj*)
- 4) Meciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*)³⁴

Islam sebagaimana dikenalkan, melalui awal dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyaratakat, disebut ayat *ahkam*³⁵.

³³ *Ibid.*, h. 6.

³⁴ *Ibid.*, h. 7.

³⁵ Moch. Fachrurroji, "Tri logi Kepemi mpi nan Islam: Analisi s Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298. Yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 57

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*³⁶.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan didalam sumber-sumber Islam banyak sekali sebagai firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S An-nisa ayat:58)³⁷.

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (politik Islam), secara bahasa *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasah* adalah pemerintahan

³⁶ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet.1, h. 297-298

³⁷ Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, h. 113.

pengambilan keputusan, pembuat kebijaksanaan pengurus dan pengawas³⁸.

b. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam al-Sultaniyat* ada 5 (lima) macam:

- 1) *Siyasah dusturiyah (siyasah Perundang-undangan)*
- 2) *Siyasah maliyah (siyasah keuangan)*
- 3) *Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan)*
- 4) *Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)*
- 5) *Siyasah idariyah (siyasah administrasi)*³⁹

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan):

- 1) *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-undang)
- 2) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)

³⁸ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2, h.3

³⁹ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2, h. 3

7) *Siyasah tanfiedziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

8) *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁰

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasri'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syari'at, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.⁴¹

1) *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:

- a) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- b) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- c) Persoalan *bai'at*
- d) Persoalan *waliyatul ahdi*
- e) Persoalan perwakilan
- f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g) Persoalan *wizarah* dan perbandinganya.⁴²

2) *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Quar'an dan Hadis

⁴⁰ *Ibid.*, h.43

⁴¹ Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak. 2014), h. 43.

⁴² Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah*, h. 32.

Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkan kedalam kajian *fiqh al-siyar wa al jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).⁴³ Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- a) Persoalan Internasional
 - b) Teritorial
 - c) Nasional dalam *fiqh Islam*
 - d) Pembagian dunia menurut *fiqh Islam*
 - e) Masalah penyerahan penjahat
 - f) Masalah pengasingan dan pengusiran
 - g) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang *dzimmi*
 - h) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qisash*.
- 3). *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintah Islam sepanjang sejarah
- a) Sumber-sumber perbendaharaan negara.
 - b) Pengeluaran dan belanja negara.
 - c) Baitul maal dan fungsinya.⁴⁴
- 4). *Fiqh siyasah harbiyah*.

⁴³ Muhammad Iqbal, h. 251.

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, h.44.

- a) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam.
- b) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan.
- c) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan.
- d) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁴⁵

c. Tujuan Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kata majemuk yang terdiri atas dua kalimat, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara terminologi, *Fiqh* merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata *faqih*-*yufaqihu*-*fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih terkenal diartikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dimengerti dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁶

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan adalah *Fiqh Siyasah Dusturiah*. *Fiqh Siyasah Dusturiah* yaitu hubungan antara pemimpin distuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya hanya dibatasi membahas peraturan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-

⁴⁵ *Ibid.*, h.45

⁴⁶ Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (jakarta: Erlangga, 2008). h. 31

prinsip keagamaan dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul alli wal aqdi
- 8) Persoalan wazarah dan perbandingannya.⁴⁷

Keseluruhan komplikasi tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- 1) Dalil Kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan mandat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, tetapi tidak akan merubah bagaimanapun perubshsn masyarakat. Karena dalil-dalil kulli menjadi unsur dinamisator dalamn mengubah masyarakat.
- 2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil *ijtihad* para ulama, walaupun tidak seluruhnya.⁴⁸

⁴⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet.1, h. 276.

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47-48.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan jika *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam, batas-batas administrasi suatu negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat *ahlu ahlwal ahli*, syarat imam, pemberhantian imam, bai'at, serta hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jaman atau yang di idhafa-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukan kepada bimbingan terhadap kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai unuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Dalam beberapa surat di Al-Qur'an yang mencontohkan yaitu terdapat pada QS: At- Taubah Ayat: 8):

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ
فُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: “Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya,

sedangkan hatinya menolak dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian)”.⁴⁹

Imammah dapat pula diartikan sebagai gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imammah juga memiliki sisi yang menyatu: peratama bersifat syar’i dan kedua siyasih.

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam, yakni hak untuk dibantu dan hak ditaati. Akan tetapi, apabila kita mempelajari lebih dalam sejarah, ternyata ada hak lainnya bagi imam, yaitu hak mendapatkan beberapa dari harta *Baitul Mal* untuk keperluan hidup dan keluarganya secara patut sesuai kedudukannya sebagai imam.⁵⁰

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interestnya* pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-Mawardi antara lain:

- 1) Memelihara Agama, Dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987), h. 55.

⁵⁰ Al-Mawardi, “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Dinniyyah*”, Musthafa Al-Arabi Al-Halabi, Mesir, h.15-16.

- 2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakan hukum-hukum allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatam yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- 6) Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut upah dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syarah atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan kepengurusan kekayaan negara kepada mereka. Akan pekerjsan

dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli. Dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.⁵¹

Bai'at (*mubayah 'ah*), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh *ahal al-hall wa al-aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.⁵² *Ahlul-Halli Wa al-aqdi* secara bahasa tersusun dari tiga kata, Ahlil, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang memiliki arti melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan, Aqdi yaitu mengikat, mengadakan transaksi membentuk. Para ahli fiqh siyasah menentukan garis besar *Ahlul-Halli Wa al-aqdi* sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan arti lain, *Ahlul-Halli Wa al-aqdi* yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi Menyebutkan *Ahlul-Hally Wa al-aqdi* dengan *Ahl ali Khtiyar*⁵³, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *ahl al-syura* atau *ahl al- Ijma'*. Sementara Al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-Ijtihad*. Sebutan yang lebih terkenal digunakan pada awal pemerintahan islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa Umar

⁵¹ Yusuf Musa, "*Nidham Al-hukm Fi Al-Islam*", Darul Kitabil Arabi, Al Qhahirah, 1963, h. 17

⁵² T.M. Hasbi Siddiqy, "*Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*", (Matahari Masa Yogya:1969), h. 66.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 138.

istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara.

Bermacam penjelasan yang dikemukakan mengenai *Ahlil-Halli Wa al-aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menjabarkan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintah maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh kepala pemerintah. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁵⁴

Ada Pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlul-Halli Wa al-aqdi* yaitu:

- 1) An-Nawawi “dalam *Al-Minhaj*” *Ahl Halli wa al-aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat kepada unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- 2) Muhammad Abduh Menyamakan *ahl all-hall wa al'aqdi* dengan *ulil amri* yang disebut dalam Al-qur'an surat An-Nisa Ayat 59.⁵⁵ Ia menafsirkan *Ulil Amri* atau Ahlu-Halli Wa al-aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, abduh menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah golongan *Ahlul-Halli Wa al-aqdi* dari kalangan

⁵⁴ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), h.74.

⁵⁵ Muahmmad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar*, h.180.

orang-orang muslim. Mereka itu adalah para *amir*, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib menaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang *mutawir*.⁵⁶

- 3) Rasyid Ridha juga berpendapat *Ulil Amri* adalah *Ahlul-Halli Wa al-Aqdi*. Iya menyatakan kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *Ahlu-Halli Wa al-Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, petani, tukang, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.⁵⁷
- 4) Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul-halli Wa al-Aqdi* dan *Ulil amri* yaitu para pemimpin dan penguasa.⁵⁸
- 5) Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang di kemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Mana*, h. 74.

⁵⁷ Muhammad, *Dhiya al-din al-Rayis*, h. 167-168.

⁵⁸ Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhi ya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Jilid V, *Dar al- Fikr*, h.149

⁵⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, *Marhabat Mshthafa al-Bat al-Halabi*, *Mishr* 1389/1979, h. 72-73

- 6) Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.⁶⁰

Adapun yang disebutkan dengan adanya *Ahlu Al-Halli Wa al-Aqdi* didalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pemimpin tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafadz *Al-Ummah* dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak kepada jalan kebaikan, termasuk didalamnya terdapat segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat melalui musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang dzalim, yakni yang melakukan penyimpangan kekuasaan dalam pemerintahan.⁶¹

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”

⁶⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, h. 6

⁶¹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 87.

Dari pengertian secara bahasa diatas, dapat disimpulkan pengertian *Ahlul Halli Wa al-Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dianggap perlu. Bila Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turats fiqh* kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan *Ulil Amri*.

Ulil Amri tekah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentua Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.⁶²

Ahl Al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan *Ahlul-Hally Wa al-Aqdi*. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independent. Ini mengakibatkan *Ahlul Halli Wa al-aqdi* tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negar, apalagi

⁶² Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 92.

kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.⁶³

Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya. Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl al-ikhtiyar. Mereka melakukan bay'ah terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.⁶⁴

Menurut Al-Mawardi secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:

- 1) Memilih Agama
- 2) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang teraniaya maupun menganiaya.
- 3) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitas dan mengadakan perjalanan dengan aman.

⁶³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h.7.

⁶⁴ Pandangan ini lebih maju beberapa abad sebelum pemikir-pemikir politik barat seperti John Locke, J. J. Rousseau dan Montesquieu merumuskan teori-teori kontrak sosial [ada abad ke 17 dan 18 M.

- 4) Menegakkan hudud.
- 5) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.
- 6) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islam setelah diajak.
- 7) Memungut harta *fa'i* dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- 8) Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
- 9) Menyampaikan amanah.
- 10) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama.⁶⁵

B. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mendekati dengan tema penelitian baik dari buku-buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, teses, dan disertasi yang penulis lakukan.

1. kesimpulan dari penelitian Zikri Alam tentang Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Rekayasa Lalu Lintas yang diatur didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor: 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan lalu lintas dan perlengkapan jalan di Kota Bandar

⁶⁵ *Ibid.* h.16

Lampung. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama meneliti tentang kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Serta, adapun perbedaan dari penelitian ini ialah objek pelaksanaannya, objek penelitian yang penulis teliti ialah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang Bertugas dalam Kesatuan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT Pengujian Kendaraan Bermotor) dan memfokuskan kepada kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor berjenis Angkutan Barang dari *Fiqh Siyasah*. Sedangkan didalam penelitian zikri alam ialah petugas Dinas Perhubungan yang mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan.⁶⁶

2. Kesimpulan dari penelitian Fitri Hardila Sari tentang pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban angkutan umum di kota Pekanbaru. Adapun yang dibahas didalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Bidang Transportasi Umum. Persamaan antara penelitian ini ialah sama sama berhubungan dengan transportasi umum. Namun perbedaannya terletak pada jenis kendaraan dan penulis meneliti tentang pengujian kendaraan tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Zikri Alam, "Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung" (Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018). Di unduh dari <http://repository.unila.ac.id/>

⁶⁷ Fitri Hardila Sari, "Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru" (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2014). Di Unduh dari <http://repository.uin-suska.ac.id/4067/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andy Irawan Koenang, S.H., M.H selaku kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Menyatakan Bahwa UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah tempat pengujian kendaraan bermotor angkutan orang maupun barang yang cangkupannya pada wilayah kota bandar lampung baik perorangan ataupun perusahaan yang Terakreditasi dengan klasifikasi Akreditasi B (Bersyarat). UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Di bentuk berdasarkan otonomi daerah tahun 2000 dan berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi bahwasanya kewenangan pengujian kendaraan bermotor itu berada pada kabupaten kota sehingga pada tahun 2002 penyerahan kewenangan pengujian kendaraan bermotor itu dari provinsi ke kota (Bandar Lampung) sehingga masuknya pengujian kendaraan bermotor memasuki kota Ban dar Lampung.

Adapun batas dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bandar Lampung yakni :

1. Timur berbatasan dengan Sekolah Trinitas Bandar Lampung.
2. Barat berbatasan dengan kantor BPKP Kota Bandar Lampung.

3. Selatan berbatasan dengan DENPOM II/3 Lampung.
4. Utara berbatasan dengan RSD. Dr. Dadi Tjokrodipo¹

2. Visi Misi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Pada dasarnya visi dan misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Memiliki visi misi yang hampir sama dengan visi misi Dinas perhubungan pada umumnya, tetapi yang membedakan visi misi UPT pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung yaitu menitik pusatkan kepada *good servis*/pelayanan yang terbaik untuk hal pengujian kendaraan bermotor. Adapun visi dan misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung adalah:

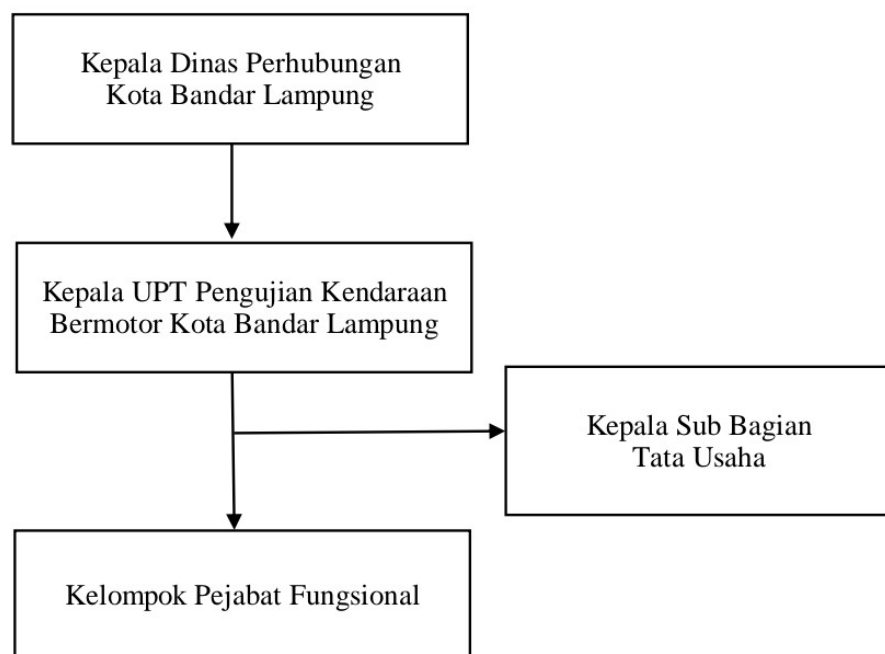
- a. Visi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung yaitu terwujudnya kondisi kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung yakni melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai prosedur, mewujudkan sistem administrasi pelayanan yang berkualitas dan terpadu. Mewujudkan kelestarian lingkungan serta kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui peningkatan kualitas hasil pengujian, melaksanakan pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor,

¹ Hasil Wawancara dengan Andy Irawan Koenang selaku kepala UPT PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

mewujudkan sistem informasi manajemen pelayanan yang handal informatif dan transparan.

3. Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sesuai Keputusan Walikota Bandar Lampung Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 maka bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bandar Lampung²

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

² Hasil Wawancara dengan Andy Irawan Koenang selaku kepala UPT PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada Bab IV perihal Uraian Tugas. Maka personil UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung memiliki Tugas Sebagai Berikut:

Tabel 1.
Fungsi dan Tugas pokok

No	Jabatan	Tugas
1	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Melaksanakan kegiatan teknis dalam Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
2	Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor.	Melaksanakan kordinasi Staf dalam rangka pelaksanaan operasional urusan UPT, melaksanakan urusan Administrasi, urusan surat menyurat, urusan umum dan kepegawaian UPT, urusan keuangan dan pelaporan UPT.
3	Kelompok Fungsional Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksa teknis dan penetapan Laik jalan kendaraan bermotor. b. Menetapkan perubahan bentuk kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukan c. Melakukan pemeriksaan fisik dumb kendaraan d. Menetapkan teknis perubahan bentuk rancang bangun dan karoseri kendaraan bermotor.

Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018³

B. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang.

1. Dasar Hukum

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Sarana Prasarana

dalam hal sarana prasarana di tempat pengujian kendaraan bermotor:

Tabel 2.

Fasilitas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung

No	Fasilitas Utama	Ketersediaan
1	Bangunan Gedung Pengujian	Ada
2	Bangunan Gedung Untuk Generaror Set, Kompresor, dan Gudang	Ada
3	Jalur Keluar Masuk	Ada

³ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018

4.	Bangunan Gedung administrasi	Ada
5	Pagar	Ada
6	Fasilitas Penujang Untuk Umum	Ada
7	Fasilitas Listrik	Ada
8	Lampu Penerangan	Ada
9	Pompa Air	Ada
10	Menara Air	Ada

Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁴

Tabel 3.

Peralatan Utama Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

No	Peralatan Utama	Ketersediaan
1	Alat Uji Emisi Gas Buang	Ada
2	Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Teste)	Ada
3	Alat Uji Kebisingan Suara Klakson dan/atau Knalpot	Ada
4	Alat Uji Rem	Ada
5	Alat Uji Lampu	Ada
6	Alat Uji Kuncup Roda Depan	Ada
7	Alat Penunjuk Kecepatan	Ada
8	Alat Pengukur Alur Ban	Ada
9	Alat Pengukur Berat	Ada

⁴ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁴

10	Alat Pengukur Dimensi	Ada
11	Alat Uji Daya Tembus Cahaya pada kaca	Ada

Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁵

Tabel 4.

Peralatan Penunjang Uji Kir Kota Bandar Lampung

No	Peralatan Penunjang	Ketersediaan
1	Kompresor Udara	Ada
2	Generator Set	Ada
3	Peralatan Bantu Antara Lain : a. Palu b. Senter c. Alat Bantu Uji Dimensi d. Alat Untuk Pengambilan foto Berwarna Kendaraan Wajib Uji e. Alat Untuk Mengisi, Membaca, Mengubah, dan Menghapus Hasil Uji Pada Kartu Uji f. Alat Untuk Mengumpulkan dan Menyimpan data hasil Uji secara digital g. <i>Toolkit</i>	Ada

⁵ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁵

Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁶

3. Pengujian kendaraan bermotor Berjenis Angkutan Barang

Jumlah Perusahaan dan perorangan yang memiliki kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang berdomisili di Kota Bandar Lampung yang melakukan pengujian kendaraan mereka yakni rata rata dalam sebulan sebanyak 60 perusahaan dan 140 perorangan dengan jumlah kendaraan bervariasi.

Terhitung dalam data tahun 2020 pada bulan Januari hingga Agustus 2020 ini tercatat jumlah kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik truck, pickup, dan tempelan dengan total 7.620 kendaraan. Yakni masing-masing Truck 4.456, Pickup 2.525, dan tempelan 21.⁷

Tabel 5

**Data Kendaraan Angkutan Barang Yang Diuji UPT
Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Januari-Agustus
2020)**

No	BULAN	TRUCK	PICKUP	TEMPELAN	JUMLAH
1	Januari	836	496	3	1.335
2	Februari	914	461	2	1.377
3	Maret	936	422	5	1.363

⁶ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁶

⁷ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2020)

4	April	319	218	-	537
5	Mei	221	139	-	360
6	Juni	469	233	2	704
7	Juli	443	354	4	801
8	Agustus	318	202	5	525
JUMLAH		4.456	2.525	21	7.002

Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2020)⁸

Dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, dan mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan lalainya pemilik kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor secara rutin 6(enam) bulan sekali, maka disini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melakukan Razia bersama Pihak kepolisian Satlantas Kota Bandar Lampung, dimana lokasi, hari, tanggal dan waktu di rahasiakan. Upaya yang dilakukan jika menemui kendaraan yang masa uji kir nya habis dan memiliki kendaraan yang kurang layak maka akan diberlakukan sanksi tilang, serta UPT pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Memeberikan Surat Edaran Baik Perusahaan Maupun Perorangan wajib menguji kendaraan berjenis angkutan barang yang mereka miliki.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung telah memberikan petunjuk bagaimana standar pelayanan melakukan

⁸ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2020)⁸

pengujian kendaraan bermotor yang di tempel di tempat pendaftaran baik yang baru pertama kali melakukan pengujian maupun yang melakukan pengujian berkala, agar pemilik kendaraan angkutan barang yang hendak melakukan pengujian kendaraannya tidak mengalami kesulitan.

Dalam pengujian kendaraan bermotor yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor pertama dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor yakni melakukan registrasi ditempat yang disediakan , persyaratan yang harus diberikan jika baru melakukan pengujian kendaraan bermotor yaitu:

- a. Foto Copy STNK
- b. Foto Copy KTP Pemilik
- c. Foto Copy BPKB
- d. Foto Copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

Selanjutnya pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket, setelah petugas menerima berkas tersebut selanjutnya petugas melakukan verifikasi berkas (uji berkala pertama) menerbitkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), kemudian pemohon membayar administrasi diloket penerimaan, setelah melakukan administrasi, penguji melakukan pengujian kendaraan bermotor pertama kali (pemeriksaan nomor rangka dan mesin, memeriksa kadar emisi gas buang, fisik, dan teknis lainnya), setelah melakukan proses pengujian pemohon diberikan hasil pengujian (lulus/tidak). Untuk

biaya Administrasi sesuai PERWALI No. 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Kota Bandar Lampung yakni: Rp. 51.000 (untuk Mobil Barang, Mobil Bus, dan Mobil Khusus), Rp. 48.000 (untuk Mobil Penumpang Umum). Untuk Waktu Pelaksanaan 2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap). Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji akan mendapatkan: Kartu Uji dan Tanda Uji, Buku Uji Berkala, Stiker Uji, Plat Uji, serta untuk kendaraan yang tidak lulus uji maka akan diberikan surat ket erangan tidak lulus uji. Sedangkan untuk yang sudah pernah melakukan pengujian kendaraan (periodik), standar pelayanan uji berkalah hampir sama dengan pertama kali namun yang membedakannya tidak perlu melampirkan BPKB tetapi melampirkan Buku Uji Berkala dan jika Buku tersebut hilang diharuskan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, petugas tidak perlu menverifikasi data dan memberikan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), petugas memeriksa bagian yang sama namun lebih detail, untuk biaya administrasi sama saja namun ditambah Rp.10.000 guna mengganti buku uji kir yang lama dan jika mengalami keterlambatan dikenakan denda 2% setiap bulannya.⁹

Menurut hasil wawancara oleh bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H selaku kepala Pengujian di bidang teknis, “Pengujian kendaraan

⁹ Data Base UPT Uji Kir Kota Bandar Lampung (2019)⁹

bermotor wajib dilakukan setiap pemilik kendaraan baik dalam kondisi baru ataupun sudah pernah melakukan khususnya kendaraan berjenis angkutan barang baik perorangan maupun perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali”¹⁰

4. Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang.

Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Mempunyai alur proses pengujian terhadap kendaraan angkutan barang yakni:

- a. Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor di pengujian kendaraan bermotor Kota Bandar Lampung dilakukan, pemohon terutama melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi seperti : Foto Copy STNK, KTP, BPKB serta Sertifikat Registrasi uji (pengujian pertama kali), Buku uji berkala dan Surat Kehilangan dari kepolisian (jika buku uji berkala sebelumnya hilang). Setelah itu pemohon menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran serta membayar administrasi dan petugas akan memverifikasi berkas tersebut.
- b. Setelah proses verifikasi berkas oleh petugas, maka pemohon dipanggil masuk keruangan dengan kendaraannya ke tempat

¹⁰ Hasil Wawancara Oleh Bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H KA. Pengujian Bidang teknis Pada 10 September 2020 pukul 13:00-14:30 WIB.

pengujian kendaraan bermotor yang telah ditentukan sesuai nomor urutnya.

- c. Setelah didalam tempat pengujian yang telah ditentukan maka yang pertama dilakukan memeriksa bagian pembuangan dari kendaraan tersebut atau disebut pengujian emisi gas buang (co) menggunakan alat co tester untuk kendaraan berbahan bensin, serta menguji ketebalan asap yang dikeluarkan dari lubang pembuangan menggunakan alat smoke tester untuk kendaraan berbahan bakar solar sesuai dengan keputusan menteri lingkungan hidup No. 5 tahun 2006.
- d. Menurut hasil wawancara kepada bapak Hari Murharyanto selaku petugas di bagian pengujian kendaraan bermotor untuk fungsinya yakni “dilakukan uji emisi gas buang bagi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin maupun solar, agar membuat pengguna jalan lain nyaman serta tidak terganggu karna asap kendaraan lain dan mencegah polusi udara”¹¹
- e. Setelah melakukan pengujian emisi gas buang selanjutnya melakukan pengujian cahaya lampu utama, menggunakan alat Headlight Tester, alat ini memiliki fungsi untuk mengukur intensitas cahaya dan sebagai alat untuk mengetahui penyimpangan lampu utama kendaraan bermotor baik penyimpangan keatas, bawah, dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Hari Murharyanto selaku petugas dibagian pengujian kendaraan bermotor pada 10 semtember 2020 pukul 13:00-14:30

penyimpangan ke kanan maupun kekiri yang bertujuan untuk apakah cahaya tersebut memadai guna menjalankan kendaraan di waktu malam, serta tidak menyilaukan pengendara yang berada pada arah sebaliknya. Selain lampu utama, yang diperiksa yakni lampu rem belakang, lampung tanda mundur, lampu tanda pindah arah (lampu sein) kanan dan kiri, Klakson, wipper (penghapus air hujan) menggunakan mata dan pendengaran secara langsung tanpa menggunakan alat.

- f. Setelah melakukan pengujian di sektor pencahayaan, wiper kaca depan, dan klakson selanjutnya memasuki tahap pengujian Kincup Roda /Sikap Roda depan kendaraan bermotor menggunakan alat Side Slip Tester. Yakni ketika roda kendaraan bagian depan menginjak alat tersebut maka akan otomatis terbaca pergerakan roda dan kaki kaki kendaraan tersebut sesuai Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Tahun 55 Tahun 2012.
- g. Setelah pengujian Kincup Roda/Sikap Roda Depan, maka yang selajutnya yakni pengujian berat kendaraan tersebut apakah sesuai yang tertera pada data kendaraan atau memiliki berat yang melebihi dari data kendaraan tersebut menggunakan alat yang bernama Axle Load. Menurut Hasil Wawancara Kepada Nopen Sani., S.E selaku petugas bagian teknis pengujian kendaraan bermotor kota bandar lampung bahwasannya “pemeriksaan berat kendaraan sangat

penting mengingat banyak sekali kejadian kecelakaan yang menimpah kendaraan yang memiliki berat yang berlebih (tidak sesuai data pada kendaraan) yang mengancam pengguna jalan lain dan sang supir itu sendiri”

- h. Setelah pengujian berat pada kendaraan, selanjutnya masuk ketahap pengujian Rem kendaraan serta melihat perbedaan gaya rem setiap sumbu kendaraan bermotor tanpa membawa beban dengan menggunakan alat yang bernama Brake Tester sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.
- i. Menurut Hasil Wawancara kepada bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H selaku Kepala Bagian Teknis Pengujian Kendaraan bermotor bahwasannya “pengujian Rem Kendaraan Bermotor Khususnya Kendaraan Angkutan barang sangat penting, mengingat rem merupakan komponen terpenting dalam kendaraan yang berfungsi memperlambat laju kendaraan untuk menghindari kejadian menabrak kendaraan yang berada didepan”.¹²
- j. Tahap pengujian selanjutnya setelah Pengujian Rem yakni pemeriksaan kondisi fisik keseluruhan hingga pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan secara teliti dan langsung tanpa menggunakan alat bantu, karna dalam hal pemeriksaan ditahap ini memerlukan ketelitian yang sangat teliti untuk memastikan kondisi

¹² Hasil Wawancara Oleh Bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H KA. Pengujian Bidang teknis Pada 10 September 2020 pukul 13:00-14:30 WIB.

fisik masih layak dan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (stnk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sidik selaku konsumen yang melakukan pengujian kendaraan bermotor angkutan barangnya menyatakan bahwa :

“Dalam pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung dari awal pendaftaran, proses pengujian kendaraan hingga selesai tidak ada masalah maupun kekurangan semua sangat baik, namun disini Dinas terkait yang memegang wewenang pengujian kendaraan bermotor kota bandar lampung kurangnya sosialisasi khususnya pemberitahuan secara merata bahwa kendaraan yang akan melakukan pengujian harus memiliki kondisi yang standar tanpa ada modifikasi sekalipun, itu dapat menyita banyak waktu bagi pemilik kendaraan melepas semua modifikasi yang tidak nmengetahui bahwasannya kendaraan tersebut harus dalam kondisi standar bawaan pabrikan”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lukas selaku konsumen yang melakukan pengujian kendaraan bermotor angkutan barangnya menyatakan bahwa :

“Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di UPT pengujian kendaraan bermotor sudah baik , namun untuk meningkatkan

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Sidik selaku konsumen PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

kepuasan konsumen yakni perlu ditingkatkan kecepatan dalam melakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang sesuai sop yang mereka katakan yakni 15 menit. agar tidak membuang banyak waktu konsumen dalam melakukan pengujian karna masih ada kerjaan lain yang harus dikerjakan konsumen”¹⁴

5. Akibat Tidak Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan bermotor memiliki dampak yang sangat buruk jika sang pemilik kendaraan bermotor khusus nya berjenis angkutan barang tidak melakukan pengujian secara rutin atau tidak memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan mereka. Hal yang sangat terjadi yakni menyebabkan kecelakaan pada kendaraan tersebut baik rem kendraan yang tidak layak, kondisi kaki kaki yang kurang baik, kondisi penerangan kurang baik dan melibatkan kendaraan lain yang berada dibelakangnya karna tidak berfungsinya dengan baik lampu lampu baik rem, sen, serta tanda mundur bagian belakang yang bisa mengakibatkan kendaraan yang berada dibelakangnya menabrak.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Lukas selaku konsumen PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

1. Faktor Pendukung.

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, mempercepat dan sebagainya terjadi sesuatu. Dalam pengujian kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung terdapat faktor pendukung baik disektor sarana dan prasarana yang baik, serta pemilik atau perusahaan yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam betapa pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor khususnya kendaraan angkutan barang untuk keselamatan pengemudi dan orang lain dijalan raya.

Faktor pendukung yang utama dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor yakni terdapat pada sarana dan prasana yang mumpuni dan masih berfungsi. Pengujian kendaraan bermotor kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yakni : Gedung pengujian, Generator, Jalur Keluar masuk, Tempat pelayanan administrasi, Pagar, listrik, lampu penerangan, pompa air, menara air, kamar mandi umum masih dalam kondisi yang baik dan terjaga dengan baik dan membuat pemohon/konsumen yang hendak melakukan pengujian kendaraan terasa nyaman, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan kembali yakni tempat untuk konsumen/pemohon makan maupun minum.

Untuk Peralatan Utama guna pelaksanaan pengujian kendaraan seperti: Alat Uji Gas buang, Ketebalan asap, Alat uji kebisingan, Uji Rem, Uji lampu, kuncup roda depan, kecepatan, alur ban, berat, dimensi dan alat tembus cahaya pada kaca masih berfungsi serta selalu di kalibrasi (pengecekan) fungsinya berjalan dengan normal atau tidak selama 2 tahun sekali dan telat tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan mendapatkan Akreditasi dengan nilai B (Bersyarat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sarkoni., S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Faktor Pendukung Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung yakni dengan menerapkan Blu-e (Bukti Lulus Uji Elektronik) yaitu “hasil maupun buku yang menjadi bukti bahwasannya telah lulus uji kendaraan bisa di lihat melalui Scand Barcode dan dilihat di website Dinas Perhubungan melalui Barcode yang tertera pada bukti tanda lulus yang diberikan, yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengecekan dan meminimalisir pemalsuan data hasil uji serta mempercepat layanan pengujian”.¹⁵

2. Faktor Penghambat

Dalam pengujian Kendaraan bermotor kota Bandar Lampung memiliki beberapa faktor penghambat, faktor penghambat itu biasanya

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sarkoni., S.Sos selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

berasal dari perusahaan maupun perorangan yang memiliki kendaraan bermotor berjenis angkutan barang tetapi kurang kesadaran diri dan enggan melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang mereka miliki, bahkan ada yang melakukan pengujian namun dengan kendaraan yang meminjam komponen kendaraan lain yang masih layak , seketika sesudah melakukan pengujian maka komponen yang dipinjam ditukar kembali dengan komponen kendaraan tersebut yang tidak layak pakai(tidak jujur). Mengapa penulis bisa berkata demikian, karna penulis melihat secara langsung kendaraan dijalan umum yang memiliki kondisi komponen yang tidak lengkap dan tidak layak tetapi masih digunakan untuk beroperasi. Serta pemiliki kendaraan angkutan barang berfikir bahwasannya proses pengujian memiliki proses yang sulit dan ribet, padahal prosesnya tidak seperti yang mereka fikirkan dan sudah diberikan petunjuk dipapan informasi. Padahal UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung sudah memberikan Surat Edaran baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor mereka.

Faktor penghambat lainnya yakni sulitnya kendaraan yang memiliki ukuran besar seperti truck fuso besar dan truck kontainer, yakni sulitnya jalan yang akan dilewati karna posisi pengujian kendaraan bermotor kota bandar lampung terletak di kota bandar lampung yang memiliki jalan yang tidak terlalu lebar dan memiliki peraturan bahwasannya kendaraan besar tidak boleh memasuki kota bandar lampung kecuali

menjelaskan terlebih dahulu jika diberhentikan oleh polisi lalu lintas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di upt pengujian kendaraan bermotor kota bandar lampung.

Selain jalan yang susah diakses untuk kendaraan besar, faktor penghambat lainnya menurut hasil wawancara kepada bapak Andy Irawan Koenang, S.H., M.H selaku Ka. UPT pengujian kendaraan bermotor Kota Bandar Lampung yakni “bahwasanya alat yang digunakan semua masih menggunakan analog (alat lama tahun 1978) belum di upgrade menjadi digital (terbaru), mengingat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung telah menggunakan BLU-e / sistem online yang sudah modern.

BAB IV

ANALISIS

A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang

Kebutuhan masyarakat akan barang-barang baik kebutuhan rumah tangga maupun sembako untuk sehari-hari di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung sangatlah besar dan sangat memerlukan dukungan kendaraan angkutan barang yang memadai guna memperlancar daya angkut barang-barang atau komoditi lainnya agar tersebar diberbagai daerah berpenduduk baik dari perusahaan penyedia layanan angkutan barang maupun perorangan yang memiliki kendaraan bermotor berjenis angkutan barang.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki mobilitas yang tinggi khususnya dalam bidang pengiriman barang yang membutuhkan sangat banyak kendaraan berjenis angkutan barang baik perusahaan maupun perorangan agar barang yang dikirim bisa menyentuh daerah-daerah dikota bandar lampung dengan aman dan selamat.

Permintaan pengiriman barang yang tinggi serta desakan infrastruktur transportasi yang memadai serta menuntut pemerintah menciptakan kendaraan bermotor berjenis angkutan barang memiliki

kondisi kendaraan yang layak jalan agar terciptanya keselamatan barang yang dikirim, keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya menyebabkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebagai abdi masyarakat terdorong untuk merespon dan mewujudkan kemauan masyarakat untuk kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang layak jalan.

Berdasarkan hasil pengamatan menurut penulis bahwa Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang saat ini sudah terlaksana baik, namun belum semuanya karena masih ada sedikit kekurangan, masih adanya proses pengujian kendaraan bermotor menggunakan alat type lama (analog) walaupun setiap 2 tahun sekali dilakukan pemeriksaan fungsi oleh Kementrian Perhubungan tetapi dikawatirkan angka yang dicatat/yang di hasilkan kurang akurat serta masih kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tentang pemahaman pentingnya pengujian kendaraan bermotor itu serta kurangnya ketelitian terhadap beberapa pengujian yang dilakukan dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat pertama yakni masih banyaknya kendaraan-kendaraan angkutan barang baik Truk Besar/Kecil maupun Pickup yang memiliki kondisi kendaraan yang kurang layak jalan namun masih beroperasi serta masih banyaknya kejadian kecelakaan yang melibatkan

kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik yang ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain karna kurang jelasnya/tidak ada lampu tanda rem serta sen bagian belakang dan kecelakaan yang melibatkan kendaraan itu sendiri seperti kurang baiknya kondisi pengereman. Hal tersebut bukan seakan-akan mutlak kesalahan dari Dinas terkait, namun kesalahan juga terletak pada pemilik kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik dari perusahaan maupun perorangan yang kurang kesadaran diri untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang miliknya itu, kebanyakan pemilik hanya cukup menservis kendaraan tersebut namun tidak melakukan pengujian kendaraan tersebut apakah hasil servis kendaraan mereka sesuai standar atau tidak yang dapat melibatkan keselamatan pengendara lain.

Kedua, adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membiarkan kendaraan bermotor tersebut walaupun terlihat tidak layak beroperasi dan bersifat tidak peduli ketika melihat kendaraan yang tidak layak tersebut tidak melakukan peneguran. Di lokasi loket administrasi dan ruang tunggu masih menggunakan Televisi Tabung dimana memunculkan siaran hiburan yang kurang baik dan belum menggunakan Televisi LED yang lebih modern serta memunculkan gambar hiburan yang lebih baik. Serta pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki fungsi yakni sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor yang memiliki serangkaian kegiatan yang memeriksa bagian-bagian dari kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan untuk keselamatan pengemudi maupun pengendara lainnya sehingga sangat penting dengan keberadaan tempat pengujian kendaraan disetiap kabupaten maupun kota.

Pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan baik mana kala masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya yang murah, waktu yang cepat, dan masyarakat sedikit atau hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan tentang Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan kendaraan bermotor serta Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala, dilihat dari segi sarana dan prasarana Bagian Fasilitas pengujian kendaraan bermotor khususnya berjenis angkutan barang sudah cukup baik dan memadai, namun ada yang perlu dibenahi kembali yakni kantin untuk konsumen makan atau minum yang sedang menunggu antrean perlu diperbaiki dikarenakan kondisinya kurang layak dan tidak nyaman serta ruang tunggu yang penulis ketahui dari konsumen

yang telah selesai melakukan pengujian dan menunggu bukti tanda lulus pengujian kendaraan mereka berpendapat bahwasannya ruang tunggu seharusnya tertutup serta disediakan makanan atau minuman ringan dan dilengkapi pendingin ruangan serta Televisi LED.

Dilihat dari Peralatan Utama dan Peralatan Penunjang Pengujian Kendaraan bermotor Sudah cukup baik dan sesuai standar tetapi perlu adanya penambahan alat seperti alat pengukur dalam ulir ban, karna selama ini dalam mengukur kedalaman ulir ban hanya menggunakan mata dan perkiraan saja. Selain penambahan alat pengukur kedalaman ulir ban, penggantian alat-alat dari manual (tahun 1976) menjadi modern digital sangat diperlukan, mengingat guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kemajuan pengujian kendaraan bermotor dikota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor memiliki tujuan yakni menciptakan kendaraan bermotor berjenis angkutan barang terkhusus di Kota Bandar Lampung dengan Kondisi kendaraan tersebut layak jalan sehingga mempermudah dan mempercepat pengiriman atau penyebaran barang-barang di Kota Bandar Lampung serta menciptakan rasa aman baik pengemudi dan pengguna jalan lainnya .

Agar UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung Memberikan manfaat optimal berupa pelayanan baik kepada perusahaan maupun perorangan yang memiliki kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang melakukan pengujian kendaraan angkutan barang yang dimilikinya di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu adanya Perusahaan maupun Perorangan yang melakukan pengujian Kendaraan Bermotor yang dimilikinya, tanpa keduanya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak memiliki arti, hanya sebatas sebuah bangunan.

Penerapan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang berkaitan dengan kaidah *good governance* menjurus pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintah yang ideal (efisien dan efektif) dalam mencapai tujuan

nasional yang hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditunjukannya kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar sesuatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, serta adanya visi.

Fiqh Siyasah Merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Untuk mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam aspek tersebut maka diperlukan beberapa nilai yang diharapkan masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan kinerja aparatur sipil negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyeruhkan tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat yang efisien maka akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan konsumen yang hendak melakukan pengujian kendaraan serta mendapatkan pelayanan yang berkualitas, adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh paradikma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan.

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*Ulil Amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu dasar syari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam memberikan pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan keperluan masyarakat yang sepenuhnya dipraktikan oleh Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*). Performa yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat didalam Al-Qur'an yang memerintahkan tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yakni terdapat didalam Qs. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah dilaksanakan, diperhatikan, serta di implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Faktor-faktor pelaksanaan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (*ulul amri*). Amanah merupakan tanggung jawab atau penyerahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT artinya penanganan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung harus sanggup mengelola dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun

2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam pemberian pelayanan terbaik bagi yang melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang aman, nyaman, dan sesuai harapan pemilik kendaraan agar kendaraan mereka dipastikan layak jalan.

Implementasi pengelolaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung masih kurang efektif jika dilihat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Bab VII Pasal 47 sampai Pasal 56, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pada BAB III Pasal 6 sampai pasal 93, dikarenakan masih kurangnya sedikit ketelitian sehingga masih ada bagian dari kendaraan tersebut yang tidak di periksa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

Hal itu terjadi karena penggunaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor masih menggunakan alat lama (analog) dan belum di ganti ke alat yang lebih modern (digital) serta kurangnya konsentrasi dalam melakukan pelayanan. Namun pada tahun yang akan datang direncanakan

penggantian alat yang lebih modern (digital) yang akan diajukan ke Kementrian Perhubungan demi peningkatan pelayanan menjadi sangat lebih baik lagi.

Pelayanan yang prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan dan memperlakukan pelanggan sebaik mungkin seperti memperlakukan diri sendiri. Adapun hadits tentang standar pelayanan yang harus diberikan sesama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA yang artinya : “tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri”(HR. Bukhori).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan dari Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor Berjenis angkutan barang di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang dilaksan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sudah dilaksanakan tetapi pada implementasinya masih belum semua terlaksana, Kurangnya ketelitian mendetail dalam pemeriksaan, singkatnya waktu dalam pemeriksaan, alat-alat yang digunakan masih menggunakan analog(tahun 1975), kurangnya penegakan dilapangan terhadap kendaraan yang tidak layak beroperasi dan kurangnya sosialisai terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang.
2. Implementasi Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penghujian Kendaraan Bemotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota

Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah* yaitu seseorang pemimpin wajib amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya didalam QS. An-Nisa: Ayat 58. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sangat sebaik-baiknya. Jangan sesekali diabaikan, akan tetapi hendaklah dilaksanakan, diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seseorang pemimpin dalam konsep *Al-Ukhuwwah* sebagai salah satu nilai *Syari'ah*, menurut penulis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah menerapkan konsep *Al-Ukhuwwah*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk pengelolaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung, perlu adanya kesadaran bersama untuk menjalankan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang supaya dapat memberikan keamanan, kenyamanan bagi supir yang membawa kendaraan angkutan barang di jalan raya dan masyarakat yang juga menggunakan jalan raya tersebut.

Untuk disektor sarana dan prasarana penulis merekomendasikan agar di perbaiki fasilitas seperti kantin dan ruang tunggu untuk konsumen yang melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang yang mereka miliki agar konsumen lebih nyaman serta makin tinggi kesadaran dalam melakukan pengujian berkala kendaraan mereka dan dalam hal alat-alat yang digunakan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, mungkin bisa mengupgrade alat yang lama (analog) menjadi alat yang lebih moder'n (digital) agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan serta terhindar dari hasil yang salah, dikarenakan juga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung juga telah menerapkan sistem BLU-e yang sudah moder'n untuk mendongkrak kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2. Bagi pemerintah Khususnya Dinas Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Penuh Atas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung agar melakukan sosialisasi sebanyak kepada perorangan maupun perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor berjenis angkutan barang tentang betapa sangat penting dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang serta memberipenjelasan apa saja berkas yang harus dilengkapi. Dan dalam melakukan

pengujian kendaraan bermotor petugas harus lebih sangat teliti, dikarenakan jika ada kesalahan sedikit dalam pemeriksaan setiap komponen demi komponen akan mengakibatkan nyawa pengemudi maupun orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , Jilid V, Marhabat Mshthafa al-Bat al-Halabi , Mi shr 1389/1979.

Al-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Al-Mawardi, “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Dinniyyah”, Musthafa Al-Arabi Al-Halabi, Mesir.

Ali Syariati, Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam

Amiriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6, Jakarta:Rajawali pers 2012

Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, Jakarta: Granit, 2004.

Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Autentisitas Ideologi dan Agama, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Agama Qur‘an Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur‘an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Djazuli, Prof. H. A. Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media Group.2003.

Farid Abdul Khaliq, Fiqih Pilitik Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, 2005.

Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam cet.1, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

H.A. Djazuli, Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003.

Hayat, Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2017.

Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al-Arabiyyat, Beirut, 1996.

Imam Al-Mawardi, Al-ahkam As-sulthani yyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat I slam

Ibnu Syarif, Muja dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. jakarta: Erlangga, 2008.

Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Juliansyah Noor, Metode Penelitian. Jakarta: Kencana 2011.

Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemetrintahan Daerah Di Indonesia, Makasar : Pustaka Refleksi. 2010 .

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Social, Bandung:Alimni, 1986.

- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Al-Razi , Fakhr al-Di n bi n Dhi ya al-Di n Umar, *Tafsi r Fakhr al-Razi , Ji li d V*, Dar al- Fi kr.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, Surabaya : Yuridika, 2002
- Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. Fiqh Siyasah; *Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta, Ombak. 2014
- Putra, Fadhillah, *New Public Governance*. Malang: UB Press, 2012.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Ratminto dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- R. Soekardono, S.H., *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.
- Savas, E.S., *“Privatization: The Key to Better Government”*. New Jersey: Chatam House Publisher, 1987.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Pen elitian Segi – Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung Jawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga: 1990.

- Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, Metodologi Penelitian. Bandung Manjar Maju, 2002.
- Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Pustaka Idea, 2016.
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung:Reifika Aditama, 2012.
- Susiadi AS, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Sutrisno dan Hadi, Metodologi Reseach Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- T.M. Hasbi Siddiqy, “Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam”, Matahari Masa Yogya:1969.
- Tubagus Ronny Ramhan Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendektan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi. Jakarta :Peradaban. 2002
- Yusuf Musa, “Nidham Al-hukm Fi Al-Islam”, Darul Kitabil Arabi, Al Qhahirah, 1963

JURNAL

- Ainun Nafiza dan Ernawati, Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan kota (Uji Kir), Jurnal Fisip Universitas Riau.2012.
- Moch. Fachruroji , “Trilogi Kepemimpinan Islam: Anali si s Teoriti k Terhadap Konsep Khi lafah, Imamah dan Imarah”, dalam Jurnal I lmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298. Yang menguti p dari Ahmad Azhar

Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994).

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Andy Irawan Koenang selaku kepala UPT PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Andy Irawan Koenang selaku kepala UPT PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara Oleh Bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H KA. Pengujian Bidang teknis Pada 10 September 2020 pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara Oleh Bapak Irwan Fatoni., S.Sos., M.H KA. Pengujian Bidang teknis Pada 10 September 2020 pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Hari Murharyanto selaku petugas dibagian pengujian kendaraan bermotor pada 10 september 2020 pukul 13:00-14:30

Hasil Wawancara dengan Sarkoni., S.Sos selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Sidik selaku konsumen PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Lukas selaku konsumen PKB Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13:00-14:30 WIB.

SUMBER ON-LINE

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota>

[https://kasriani.wordpress.com/2011/02/14/jenis-jenis kendaraan/](https://kasriani.wordpress.com/2011/02/14/jenis-jenis-kendaraan/)

<https://sumbarprov.go.id/details/news/12869>.


<http://dishub.wonogirikab.go.idoy/halaman/detail/pengujian-kendaraan-bermotor>.

Fitri Hardila Sari, “Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2014). Di Unduh dari <http://repository.uin-suska.ac.id/4067/>

Zikri Alam, “Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018). Di unduh dari <http://repository.unila.ac.id/>”

LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

REKOMENDASI PENELITIAN DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/0217/V.16/2020


DASAR	: 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
MEMBACA	: Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.1390/Un.16/DS/PP.009/8/2020 Tanggal 26-08-2020 perihal Permohonan Izin Riset
MEMPERHATIKAN	: Proposal Penelitian


MEREKOMENDASIKAN :

Nama / NPM / NIP Jenis Kelamin Tempat/Tgl.Lahir Alamat Pekerjaan Tujuan Lokasi Penelitian Judul Penelitian Waktu yang diberikan	: Rizki Maulana Yudi / 1621020304 : Laki - laki : Teluk Betung / 08-07-1998 : Rangai Utara, Rt/Rw-02/02, Kel/desa: Rangai Tri Tunggal, Kecamatan: Katibung KAB. LAMPUNG SELATAN : Mahasiswa : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi : Jl. Basuki Rahmat No. 31, Suimur Putri, kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) : 03 September 2020 s/d 03 November 2020
---	--

Dengan Ketentuan :

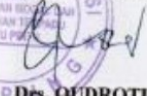
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Peneliti/Survei tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon Agar senantiasa Memenuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).





Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG,


Dr. QUDROTUL IKHWAN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650107 199402 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
2. Kepala UPT Uji KIR Bandar Lampung;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Cq. Dekan Fakultas Syariah.

Lampiran 2



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo No. 02 Gedung Semergou Lantai 3 Teluk Betung Utara Telpn 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35215

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/ 763 /IV.05/2020

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 , tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 6. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Surat dari Dekan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.1390/Un.16/DS/PP.009/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA/ NPM	: RIZKI MAULANA YUDI / 1621020304
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan Lampung
Alamat	: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung
Tujuan	: Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
Lamanya	: 2 (Dua) Bulan
Judul	: "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERJENIS ANGKUTAN BARANG (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG)"
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan Lampung

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : **3 SEPTEMBER 2020 S/D 3 NOVEMBER 2020**

- CATATAN** :
1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian/survey yang bersangkutan
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan izin akan dicabut.
 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 3 September 2020

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris

M. FIKRI SH. MM.
Pembina Tingkat I
19641209 198703 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
3. Sdr. Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
4. -----Arsip-----



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (Kompleks Terminal Rajabasa Raya)
BANDAR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 158 / III.13.01/09/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMHURIYANTO, S.Sos
NIP : 19630704 198801 1 004
Pangkat : Penata TK.I / III.d
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI MAULANA YUDI
NPM : 16210200304
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 September 2020

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


JAMHURIYANTO, S.Sos
Penata TK.I
NIP. 19630704 198801 1 004

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Sejarah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
2. Apakah Visi, Misi, dan Tujuan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
3. Bagaimana Sarana dan Prasarana serta Kelengkapan dan bagaimana kondisi yang berada pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung ?
4. Bagaimana Proses Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
5. Apakah akibat yang ditimbulkan ketika tidak melakukan pengujian kendaraan secara berkala ?
6. Adakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

Lampiran 5 :Dokumentasi Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung





Lampiran 6 : Blanko Bimbingan Skripsi



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama/NPM : Rizki Maulana Yudi /1621020155

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi., S.Ag., M.Kom.I

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas
Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Bermotor
Berjenis Angkutan Barang (Studi di Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pemb I	Pemb II
1	10 Januari 2020	Konsultasi Proposal Seminar		
2	05 Maret 2020	ACC Seminar Proposal		
3	16 April 2020	Seminar Proposal		

4	05 Juni 2020	Perbaikan Proposal Skripsi dengan Pemb II		
5	29 Juni 2020	ACC Proposal Skripsi dengan Pemb II		
6	25 Juni 2020	Perbaikan Proposal Skripsi dengan Pemb I		
7	07 Juli 2020	ACC Proposal Skripsi Untuk dilanjutkan Penulisan Sampai Bab V dengan Pemb I		
8	14 Desember 2020	Konsultasi Bab I-V dengan Pemb II		
11	16 Desember 2020	ACC Bab I-V dengan Pemb II		
12	20 Desember 2020	Konsultasi Bab I-V dengan Pemb I		
13	22 Desember 2020	ACC Bab I-V dg Pemb I		

Bandar Lampung, 18 Januari 2021

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II



Relit Nur Edi., S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003